

Rabu, 23 Februari 2011

Triliun Rupiah Temuan BPK Belum Disikapi

PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar mencatat selama kurun 2004 hingga semester II 2010, terdapat 2144 temuan penggunaan keuangan seluruh pemerintah daerah se-Kalbar. Nilai temuan itu sangat fantastis, yakni mencapai Rp 35,313 triliun.

“Dari jumlah 2144 temuan

itu, yang sudah ditindaklanjuti sekitar 47 persen. Sekitar 30 persen dalam proses tindak lanjut, dan sekitar 22 persen belum ada tindak lanjut,” kata Ir Adi Sudibyo, Kepala BPK Perwakilan Kalbar melalui Kepala Sub Auditoral Kalbar I BPK Perwakilan Kalbar, Hernold Ferry Makawimbang MSi kepada Equator di Hotel Mercure,

Pontianak, Selasa (22/2).

Hernold yang menjadi moderator acara Sosialisasi Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 itu menegaskan, meski jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti baru sekitar 50 persen, namun nilainya cukup banyak. Artinya, nilai yang belum ditindaklanjuti lebih kecil.

“Jika dirupiahkan, nilai temuan yang belum ditindaklanjuti sekitar Rp 1,223 triliun,” ujarnya.

Nilai temuan itu belum berstatus kerugian negara. Temuan tersebut merupakan fakta yang ditemui BPK dalam proses penggunaan keuangan seluruh Pemda di Kalbar yang belum

■ Halaman 7

Triliun Rupiah

ada atau belum lengkap laporan penggunaannya.

Temuan itu diperoleh BPK dari hasil memeriksa penggunaan keuangan di 15 entitas (sasaran audit). Entitas dimaksud meliputi 14 kabupaten/kota dan provinsi. Terhadap temuan-temuan itu, BPK memberikan rekomendasi penyelesaiannya kepada entitas masing-masing. “Kita masih menunggu tindak lanjut entitas terhadap rekomendasi yang kita berikan,” ujar Hernold.

BPK mencatat, temuan terbanyak berada pada lingkup pemerintah provinsi Kalbar. Jumlah temuan sejak 2004 hingga semester II 2010 mencapai 329 temuan dengan nilai uang mencapai Rp 4,398 triliun.

Terhadap 329 temuan itu, BPK membuatkan 700 rekomendasi atau saran. Nilai 700 rekomendasi jika diikuti semua mencapai Rp 535,834 miliar. “Pemerintah provinsi sudah menindaklanjuti 300 rekomendasi. Sebanyak 213

masih dalam proses, dan 187 belum ditindaklanjuti,” beber Hernold.

Posisi kedua diduduki Kota Pontianak. BPK mencatat ada 204 temuan dengan nilai temuan mencapai Rp 5,888 triliun. Terhadap temuan itu, BPK memberikan 372 rekomendasi dengan nilai Rp 1,482 triliun.

Hingga sekarang, Pemkot Pontianak sudah menindaklanjuti 176 rekomendasi BPK. Sebanyak 144 rekomendasi masih

dalam proses tindak lanjut, dan 52 rekomendasi belum ditindaklanjuti sama sekali.

Temuan terkecil berada pada Kabupaten Kubu Raya (KKR). BPK menemukan 20 temuan dengan nilai Rp 333,746 miliar. Terhadap 20 temuan itu, BPK memberikan 38 rekomendasi.

“Dari jumlah 38 rekomendasi tersebut, KKR sudah menindaklanjuti 23 rekomendasi. Sisa 15 rekomendasi dalam proses tindak lanjut,” pungkas Hernold. (bdu)

..... dari halaman 1